

Catatan singkat dari hasil briefing di MAKOREM 084 Surabaya.

1. Tanggal dan tempat briefing : Tgl. 4 JUNI 1973 bertempat di-
OPSRUM MAKOREM 084 "BHASKARA-
JAYA" Surabaya.-
2. Hadir dalam briefing adalah : a. Residen/Pembantu Gubernur -
untuk Madura (diwakili oleh
Drs. Harsono, Kapuditsus un-
tuk Madura).
b. Komtarres 101 Surabaya.
c. Semua Bupati/Walikota, semua
Dan Dim, semua Sekda, semua -
anggota D.P.D. Golkar yang
ada dalam daerah wewenang -
Korem 084 "Bhaskara Jaya".-
3. Pimpinan briefing : DAN REM 084 (Kol. BLEGOH SOEMAR-
TO).
4. Dimulai jam : 09.10
5. Susunan Acara : a. Pembinaan Karyawan ABRI.
b. Pengamanan Pengadaan Pa-
ngan.
c. Larangan sementara pembentu-
kan PARTAI DEMOKRASI INDONE-
SIA dan PARTAI PERSATUAN -
PEMBANGUNAN dibawah tingkat
Caoeng.
d. Realisasi Dharma Pusaka '45.
e. Continuitas pelaksanaan IN-
SOP TEGAS.-

6. Penjelasan-penjelasan :

I. PEMBINAAN KARYAWAN ABRI.

1. Instruksi yang diberikan oleh Pangdam VIII kepada ABRI di
Kediri tgl. 24-5-1973 ybl. ada kemungkinan direalisasi ter-
hadap semua anggota GOLKAR.
2. Diharapkan supaya setelah tgl. 24-5-1973, pertentangan-2 -
yang banyak timbul dalam tubuh Golkar sendiri dapatnya di-
akhiri. Jika setelah tgl. tersebut masih toch timbul per-
tentangan-2, maka yang berwajib akan mengambil tindakan,-
di mana 5 unit yang dianggap sebagai sumber dari timbulnya
pertentangan-2 yang dimaksud (yakni : Bupati Kdh, Sekreta-
ris Daerah, Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Gol-
kar) akan dipanggil untuk dimintai pertanggung-jawab. Da-
ri mereka ini akan dimintakan fakta-2 yang menyebabkan -
timbulnya pertentangan-2, bukan sinyalemen-2 atau informa-
si-2.
3. Untuk tidak menimbulkan adanya pertentangan-2 semacam di-
atas, maka diharapkan agar :
 - a. Setiap masalah supaya diselesaikan secara konsultatif.
 - b. Antara yang satu dengan yang lain supaya saling harga-
menghargai dan sebaliknya jangan saling mendominasi.
 - c. Janganlah menganggap dirinya itu yang paling benar dan
berusahalah untuk mengakui kebenaran orang/pihak lain
dari siapapun dan dari manapun juga datangnya.
 - d. Sesama anggota Golkar hendaknya harus saling terbuka.
 - e. Janganlah menganggap bahwa D.P.R.D. itu sebagai boneka
dan janganlah berpikir secara individualistis tetapi -
secara melembaga.
4. Contoh adanya pertentangan-2 yang timbul dalam tubuh Gol-
kar sendiri, misalnya peristiwa di Madiun (antara Bupati
dan Kodim yang menyebabkan kedua-2nya get-out), peristiwa
di Situbondo (antara Sekda dan D.P.R.D.), peristiwa di -
Bondowoso dll. Syukurlah, bahwa peristiwa-2 tersebut ti-
dak timbul dalam daerah wewenang REM 084.-

Selanjutnya.....

5. Selanjutnya, dibawah ini perlu diopsommen beberapa kejadian didaerah wewenang REM 084, berturut-turut :
- a. BANGKALAN : 1. Kasus penggantian anggota DPRD harus dilakukan secara prosedural. Orang-orang Golkar hendaknya jangan ikut-ikutan membenarkan cara-cara yang non-prosedural.
 2. Kasus seorang guru S.M.P. yang dulu - sebelum Pemilu tidak mau menandatangani monoloyalitas, tetapi kini telah direhabilitir. Karena rehabilitasi ini menimbulkan kesan-suara yang kurang baik di Bangkalan, maka dengan persetujuan Perwakilan P.D.K. tertinggal mulai tgl. 23-5-1973 yang bersangkutan telah dipindah keluar daerah Bangkalan.
 - b. SAMPANG : Dalam kasus penggantian anggota D.P.R.D. hendaknya DAN DIM sebagai PULAKSUS jangan bertindak ragu-ragu. Sebagai Pulaksus, Dan Dim mempunyai wewenang penuh untuk menolak setiap calon pengganti yang masih diragukan.
 - c. PAMEKASAN : Untuk menyelesaikan orang-orang Pemda bekas anggota P.P.D.I. dan BAPERKI, pelajari kembali peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang ada. Perlu adanya kontinuitas kegiatan dari pada masing-masing Team Screening Jawatan. Rekomendasi yang diberikan oleh T.S.J. yang dulu janganlah dibuat sebagai pedoman yang tetap, tetapi haruslah dibuat suatu clearance mengenai diri mereka secara kontinyu melalui Team Screening.
6. Rencana pemberian penerangan tentang TAP-2 M.P.R. hendaknya dilakukan dengan mengingat :
- Timing-nya yang tepat.
 - Karena sampai saat ini belum ada/terdengar issue yang negatif terhadap TAP-2 M.P.R. tersebut, maka rencana seperti ini oleh Dan Rem dipandang masih belum perlu. Oleh karena itu, maka sebaiknya kegiatan-kegiatan yang ada diarahkan saja kepada kegiatan-kegiatan lain yang lebih penting dan aktual, misalnya tentang kegiatan Pengadaan-Pangan.
7. Darul Hadits (LEMKARI-LEMBAGA KARYAWAN ISLAM) :
- Sebenarnya ia sudah mendapat restu karena D.H. bukan aliran Subaidah.
 - Walaupun sudah mendapat restu namun setiap pertemuannya harus minta izin dari yang berwajib. Apabila pertemuan itu tidak mendapat izin dari yang berwajib, maka dapat diadakan penangkapan. (contoh:Pamekasan).
 - Cara-cara yang ekstrem dalam menghilangkan fanatisme agama seperti yang dijalankan oleh D.H. ini tidak dapat disetujui oleh Pemerintah.
8. Masalah Air (misalnya di Sumenep):
- Setiap permasalahan air yang arahnya akan menghambat Pembangunan supaya diambil tindakan.

II. PENGAMANAN PENGADAAN PANGAN.

1. Dasar-dasarnya : a. Perintah lisan Pangdam VIII Brawijaya dalam rapat-dinas dengan Gubernur Jatim pada tgl. 2-4-1973.
 - b. Perintah lisan Pangdam VIII Brawijaya dalam rapatnya di Malang pada tgl. 30-5-1973 dimana dalam rapat kedua ini Pangdam VIII telah mengadakan pembicaraan telepon dengan Bapak Gubernur Jatim.
 - c. Perintah Laksus tgl. 29-5-1973 no.74.
2. Teknik pengamanannya : Diusahakan.....

Diusahakan agar diperoleh data-2 sebanyak mungkin tentang faktor-2 yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan pangan. Semakin banyak faktor-2 yang akan diperoleh maka akan semakin baiklah pelaksanaan itu. Teknik-2 yg dapat dikemukakan disini adalah :

1. Prinsip pasaran bebas harus dijaga. Dalam hubungan ini perlu dijaga pula adanya hubungan antara Bupati yang satu dengan Bupati yang lainnya. Peraturan yang melarang pengeluaran beras keluar daerah Propinsi Jawa-Timur perlu diadakan. Ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya target yang diberikan kepada Prop. Jatim (65% dari seluruh jatah Nasional). Diinstruksikan agar medio Juni 1973 Prop. Jatim sudah harus dapat mengumpulkan beras sejumlah 175.000 ton. Untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan pangan ini, B.R.I. dapat memberikan kreditnya kepada Bupati ybs.
2. Rencana pengiriman Tim Survey kedaerah-daerah. Hendaknya ini jangan dianggap sebagai suatu usaha untuk menyelidiki kesalahan dari pada masing-2 Bupati, tetapi hal ini dimaksudkan untuk ikut serta membantu para petugas di daerah-daerah dalam rangka pengumpulan data-2/faktor-2 yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pengadaan pangan. Diharapkan adanya pengertian dari pada masing-2 Bupati. Diharapkan pula agar hal ini jangan sampai diexposekan kepada para Kepala Desa.
3. Mengadakan pencatatan terhadap penimbun-2 beras, dengan mengutamakan pedagang dan para tengkulak beras sebagai obyek. Pencatatan ini hendaknya dilakukan secara diam-2 (silence-operation) dan untuk tugas ini Dirsus supaya aktif melaksanakannya.

Hal-hal lain yang menyebabkan angka-2 tidak cocok dengan kenyataan-2 yang sebenarnya, adalah :

1. Penentuan areal persawahan yang tidak up to date, karena angka-2 tersebut didasarkan kepada angka-2 yang lama.
2. Karena tidak semua petani yang membimaskan sawahnya menanam padi dengan padi dan bahkan ada yg disewakan kepada orang lain.

III. LARANGAN SEMENTARA PEMBENTUKAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA + DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DIBAWAH TINGKAT CABANG.

1. Dasar-2nya : a. Tilgram KOPKAMTIB no.118 tgl.14-2-1973.--
b. Berita interlokal LAKSUS tgl.24-5-1973.--
c. Perintah PULAKSUS yang didasarkan kepada Gubernur tgl.25-5-1973 yang isinya bahwa untuk sementara lembaga kepengurusan hanya dibenarkan sampai tingkat II saja.
2. Cara menolak: Hendaknya diberikan secara simpatik dan penjelasan-2 yang cukup sehingga tidak akan menimbulkan kesan yang negatif bagi mereka.
3. Tindakan-2 : Jika terjadi pelanggaran, maka untuk sementara boleh diadakan penahanan.

IV. REALISASI DHARMA PUSAKA 1945.

1. Dharma Pusaka 45 (ada bukunya), yang telah disahkan dengan s.k. MEN HANKAM/PANGAB tgl.10-11-1972 no.SKEP/B/911/XI/1972 ada kemungkinan diperlakukan pula bagi umum. (Jadi tidak berlaku hanya untuk anggota ARII saja.)
2. Dharma Pusaka 45 menjelaskan tentang cara-2 meneruskan nilai-2 1945 kepada generasi muda dengan proses-2 sbb. :
 - a. Proses Sosialisasi.
 - b. " Edukasi.
 - c. Proses Tauladan.
 - d. " KOMUNIKASI.

Dalam proses.....

Dalam proses Edukasi ini, maka tempat-2 yang bersejarah (umpamanya tempat dapur-umum waktu zaman pertempuran dahulu, tempat tentara pejuang kita mempertahankan diri, tempat gugurnya pahlawan-2 kita semasa pertempuran dll. semacamnya), perlu didirikan tanda-2/tugu-2 yang sifatnya monumantal. Penempatan monumen-2 tersebut tidak mutlak harus dikota dan juga tidak perlu yang mahal-2, bahkan kalau perlu cukup dengan batu/patok saja yang diberi gambar-2/ukiran-2 tapi yg bisa tahan lama.

Dalam pembuatan monumen itu hendaknya dijaga jangan sampai menimbulkan adanya animisme. Oleh karena itu, dalam upacara pembukaannya nanti perlu diberi penjelasan-2 yang benar tentang maksud dan tujuannya.

V. CONTINUITAS PELAKSANAAN INSOP TEGAS.

1. Perlu dilaksanakan secara kontinyu karena unsur-2nya telah lengkap.
2. Ketentuan untuk "Menembak mati ditempat" bagi setiap sabotir harus direalisir secara nyata.

7. PENUTUP.

Dengan ucapan terima-kasih, briefing ini telah ditutup dengan selamat tepat pada jam 11.35 W.I.J.-

Dicatat oleh :


(Drs. HARSONO S.)

Catatan singkat dari hasil briefing di MAKOREM 084 Surabaya.

1. Tanggal dan tempat briefing : Tgl. 4 JUNI 1973 bertempat di-
OPSRUM MAKOREM 084 "BHASKARA-
JAYA" Surabaya.-
2. Hadir dalam briefing adalah : a. Residen/Pembantu Gubernur -
untuk Madura (diwakili oleh
Drs. Harsono, Kapuditsus un-
tuk Madura).
b. Komarres 101 Surabaya.
c. Semua Bupati/Walikota, semua
Dan Dim, semua Sekda, semua -
anggota D.P.D. Golkar yang
ada dalam daerah wewenang -
Korem 084 "Bhaskara Jaya".-
3. Pimpinan briefing : DAN REM 084 (Kol. BLEGOH SOEMAR-
TO).
4. Dimulai jam : 09.10
5. Susunan Acara : a. Pembinaan Karyawan ABRI.
b. Pengamanan Pengadaan Pa-
ngan.
c. Larangan sementara pembentu-
kan PARTAI DEMOKRASI INDONE-
SIA dan PARTAI PERSATUAN -
PEMBANGUNAN dibawah tingkat
Cabang.
d. Realisasi Dharma Pusaka '45.
e. Continuitas pelaksanaan IN-
SOP TEGAS.-

6. Penjelasan-penjelasan :

I. PEMBINAAN KARYAWAN ABRI,

1. Instruksi yang diberikan oleh Pangdam VIII kepada ABRI di Kediri tgl. 24-5-1973 ybl. ada kemungkinan direalisasi terhadap semua anggota GOLKAR.
2. Diharapkan supaya setelah tgl. 24-5-1973, pertentangan-2 yang banyak timbul dalam tubuh Golkar sendiri dapatnya diakhiri. Jika setelah tgl. tersebut masih toch timbul pertentangan-2, maka yang berwajib akan mengambil tindakan, dimana 5 unit yang dianggap sebagai sumber dari timbulnya pertentangan-2 yang dimaksud (yakni : Bupati Kdh, Sekretaris Daerah, Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Golkar) akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Dari mereka ini akan dimintakan fakta-2 yang menyebabkan timbulnya pertentangan-2, bukan sinyalemen-2 atau informasi-2.
3. Untuk tidak menimbulkan adanya pertentangan-2 semacam diatas, maka diharapkan agar :
 - a. Setiap masalah supaya diselesaikan secara konsultatif.
 - b. Antara yang satu dengan yang lain supaya saling menghargai dan sebaliknya jangan saling mendominasi.
 - c. Janganlah menganggap dirinya itu yang paling benar dan berusaha untuk mengakui kebenaran orang/pihak lain dari siapapun dan dari manapun juga datangnya.
 - d. Sesama anggota Golkar hendaknya harus saling terbuka.
 - e. Janganlah menganggap bahwa D.P.R.D. itu sebagai boneka dan janganlah berpikir secara individualistis tetapi secara melembaga.
4. Contoh adanya pertentangan-2 yang timbul dalam tubuh Golkar sendiri, misalnya peristiwa di Madiun (antara Bupati dan Kodim yang menyebabkan kedua-2nya get-cut), peristiwa di Situbondo (antara Sekda dan D.P.R.D.), peristiwa di Bondowoso dll. Syukurlah, bahwa peristiwa-2 tersebut tidak timbul dalam daerah wewenang REM 084.-

Selanjutnya.....

5. Selanjutnya, dibawah ini perlu diopsommen beberapa kejadian didaerah wewenang REM 084, berturut-turut :
- a. BANGKALAN : 1. Kasus penggantian anggota DPRD harus dilakukan secara prosedural. Orang-orang Golkar hendaknya jangan ikut-orang membe-narkan cara-orang yang non-prosedural.
2. Kasus seorang guru S.M.P. yang dulu - sebelum Pemilu tidak mau menandatangani monoloyalitas, tetapi kini telah - direhabilitir. Karena rehabilitasi - ini menimbulkan kesan-orang/suara-orang yang kurang baik di Bangkalan, maka dengan persetujuan Perwakilan P.D.K. terhi - tung mulai tgl. 23-5-1973 yang ber - sangkutan telah dipindah keluar dae - rah Bangkalan.
 - b. SAMPANG : Dalam kasus penggantian anggota D.P.R.D hendaknya DAN DIM sebagai PULAKSUS ja - ngan bertindak ragu-ragu. Sebagai Pulak - sus, Dan Dim mempunyai wewenang penuh un - tuk menolak setiap calon pengganti yang masih diragukan.
 - c. PAMEKASAN : Untuk menyelesaikan orang-orang Pemda bekas anggota P.P.D.I. dan BAPERKI, pelajari - kembali peraturan-orang dan instruksi-orang yang ada.
Perlu adanya kontinuitas kegiatan dari - pada masing-orang Team Screening Jawatan. Rekomendasi yang diberikan oleh T.S.J. - yang dulu janganlah dibuat sebagai pedo - man yang tetap, tetapi haruslah dibuat - suatu clearance mengenai diri mereka se - cara kontinyu melalui Team Screening.
6. Rencana pemberian penerangan tentang TAP-orang M.P.R. hendak nya dilakukan dengan mengingat :
- Timing-nya yang tepat.
 - Karena sampai saat ini belum ada/terdengar issue-orang yg negatif terhadap TAP-orang M.P.R. tersebut, maka rencana-orang seperti ini oleh Dan Rem dipandang masih belum perlu. Oleh karena itu, maka sebaiknya kegiatan-orang yang ada - diarahkan saja kepada kegiatan-orang lain yang lebih pen - ting dan aktual, misalnya tentang kegiatan Pengadaan - Pangan.
7. Darul Hadits (LEMKARI-LEMBAGA KARYAWAN ISLAM) :
- Sebenarnya ia sudah mendapat restu karena D.H. bukan - aliran Subaidah.
 - Walaupun sudah mendapat restu namun setiap pertemun - nya harus minta idzin dari yang berwajib. Apabila per - temuan itu tidak mendapat idzin dari yang berwajib, ma - ka dapat diadakan penangkapan. (contoh:Pamekasan).-
 - Cara-orang yang extrem dalam menghilangkan fanatisme aga - ma seperti yang dijalankan oleh D.H. ini tidak dapat - disetujui oleh Pemerintah.
8. Masalah Air (misalnya di Sumenep):
- Setiap permasalahan air yang arahnya akan menghambat - Pembangunan supaya diambil tindakan.

II. PENGAMANAN PENGADAAN PANGAN.

1. Dasar-orang : a. Perintah lisan Pangdam VIII Brawijaya da - lam rapat-dinas dengan Gubernur Jatim pa - da tgl. 2-4-1973.
b. Perintah lisan Pangdam VIII Brawijaya da - lam rapatnya di Malang pada tgl.30-5-1973 dimana dalam rapat kedua ini Pangdam VIII telah mengadakan pembicaraan tilpon de - ngan Bapak Gubernur Jatim.
c. Perintah Laksus tgl. 29-5-1973 no.74.
2. Tehnik pengamanannya : Diusahakan.....

Diusahakan agar diperoleh data-2 sebanyak mungkin tentang faktor-2 yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan pangan. Semakin banyak faktor-2 yang akan diperoleh maka akan semakin baiklah pelaksanaan itu. Teknik-2 yg dapat dikemukakan disini adalah :

1. Prinsip pasar bebas harus dijaga. Dalam hubungan ini perlu dijaga pula adanya hubungan antara Bupati yang satu dengan Bupati yang lainnya. Peraturan yang melarang pengeluaran beras keluar daerah Propinsi Jawa-Timur perlu diadakan. Ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya target yang diberikan kepada Prop. Jatim (65% dari seluruh jatah Nasional). Dianstruksikan agar medio Juni 1973 Prop. Jatim sudah harus dapat mengumpulkan beras sejumlah 175.000 ton. Untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan pangan ini, B.R.I. dapat memberikan kreditnya kepada Bupati ybs.
2. Rencana pengiriman Tim Survey kedaerah-daerah. Hendaknya ini jangan dianggap sebagai suatu usaha untuk menyelidiki kesalahan dari pada masing-2 Bupati, tetapi hal ini dimaksudkan untuk ikut serta membantu para petugas di daerah-daerah dalam rangka pengumpulan data-2/faktor-2 yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pengadaan pangan. Diharapkan adanya pengertian dari pada masing-2 Bupati. Diharapkan pula agar hal ini jangan sampai diexposekan kepada para Kepala Desa.
3. Mengadakan pencatatan terhadap penimbun-2 beras, dengan mengutamakan pedagang dan para tengkulak beras sebagai obyek. Pencatatan ini hendaknya dilakukan secara diam-2 (silence-operation) dan untuk tugas ini Dirsus supaya aktif melaksanakan.

Hal-hal lain yang menyebabkan angka-2 tidak cocok dengan kenyataan-2 yang sebenarnya, adalah :

1. Penentuan areal persawahan yang tidak up to date, karena angka-2 tersebut didasarkan kepada angka-2 yang lama.
2. Karena tidak semua petani yang membimaskan sawahnya menanam sawahnya itu dengan padi dan bahkan ada yg disewakan kepada orang lain.

III. LARANGAN SEMENTARA PEMBENTUKAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA + DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DIBAWAH TINGKAT CABANG.

1. Dasar-2nya : a. Tilgram KOPKAMTIB no.148 tgl.14-2-1973.-
b. Berita interlokal LAKSUS tgl.24-5-1973.-
c. Perintah PULAKSUS yang didasarkan kepada Gubernur tgl.25-5-1973 yang isinya bahwa untuk sementara lembaga kepengurusan hanya dibenarkan sampai tingkat II saja.
2. Cara menolak: Hendaknya diberikan secara simpatik dan penjelasan-2 yang cukup sehingga tidak akan menimbulkan kesan yang negatif bagi mereka.
3. Tindakan-2 : Jika terjadi pelanggaran, maka untuk sementara boleh diadakan penahanan.

IV. REALISASI DHARMA PUSAKA 1945.

1. Dharma Pusaka 45 (ada bukunya), yang telah disahkan dengan s.k. MEN HANKAM/PANGAB tgl.10-11-1972 no.SKEP/B/911/XI/1972 ada kemungkinan diperlakukan pula bagi umum. (Jadi tidak berlaku hanya untuk anggota AHRI saja.)
2. Dharma Pusaka 45 menjelaskan tentang cara-2 meneruskan nilai-2 1945 kepada generasi muda dengan proses-2 sbb. :
 - a. Proses Sosialisasi.
 - b. " Edukasi.
 - c. Proses Tauladan.
 - d. " KOMUNIKASI.

Dalam proses.....

Dalam proses Edukasi ini, maka tempat-2 yang bersejarah (umpamanya tempat dapur-umum waktu zaman pertempuran dahulu, tempat tentara pejuang kita mempertahankan diri, tempat gugurnya pahlawan-2 kita semasa pertempuran dll. semacamnya), perlu didirikan tanda-2/tugu-2 yang sifatnya monumantal. Penempatan monumen-2 tersebut tidak mutlak harus dikota dan juga tidak perlu yang mahal-2, bahkan kalau perlu cukup dengan batu/patok saja yang diberi gambar-2/ukiran-2 tapi yg bisa tahan lama.

Dalam pembuatan monumen itu hendaknya dijaga jangan sampai menimbulkan adanya animisme. Oleh karena itu, dalam upacara pembukaannya nanti perlu diberi penjelasan-2 yang benar tentang maksud dan tujuannya.

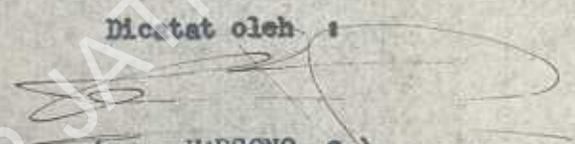
V. CONTINUITAS PELAKSANAAN INSOP TEGAS.

1. Perlu dilaksanakan secara kontinyu karena unsur-2nya telah lengkap.
2. Ketentuan untuk "Menembak mati ditempat" bagi setiap sabotir harus direalisir secara nyata.

7. PENUTUP.

Dengan ucapan terima-kasih, briefing ini telah ditutup dengan selamat tepat pada jam 11.35 W.I.J.-

Dicatat oleh :


(Drs. HARSONO S.)

DISPERPUSIP JATIM